



Kemiskinan Masalah Multidimensi

▶ **Pemkab Kapuas Hulu dan UMP Pontianak Gelar FGD**

PUTUSSIBAU, SP - Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, tidak hanya di tingkat daerah namun juga menjadi salah satu permasalahan nasional. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu memandang perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2022-2027.

"Penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, dan diperlukan penanganan secara multi sektor," ungkap Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kapuas Hulu, Yohanes Telajan, Rabu (30/3).

Yohanes mengungkapkan, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu bersama Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak menggelar

Yohanes Telajan

Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kapuas Hulu



Penanggulangan kemiskinan ini juga untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan dalam arti luas. Jadi tidak hanya mencakup upaya mengatasi ketidakmampuan untuk konsumsi dasar saja, tetapi juga mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, partisipasi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya secara penuh, agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat.

Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2027. Kegiatan di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu tersebut diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam implementasi penanggulangan kemiskinan, jelas Yohanes, memerlukan peran serta berbagai pelaku pembangunan (stakeholders), baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dan masyarakat.

"RPKD merupakan upaya pemerintah daerah dalam perencanaan, dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya," ungkapnya.

Tujuan FGD RPKD digelar di Kabupaten Kapuas Hulu, kata Yohanes, guna menurunkan jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan secara bertahap dan progresif per tahun.

"Penanggulangan kemiskinan ini juga untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan dalam arti luas. Jadi tidak hanya mencakup upaya mengatasi ketidakmampuan untuk konsumsi dasar saja, tetapi juga mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, partisipasi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya secara penuh, agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat," papatnya. (sap)